

Judul : DPR Segera Bahas Anggaran Gedung Baru
Tanggal : Jumat, 25 Agustus 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 29

DPR Segera Bahas Anggaran Gedung Baru

Sri Mulyani: Rencana pembangunan gedung baru selalu dinilai negatif oleh masyarakat.

Hussein Abri Dongoran
Hussein.abri@tempo.co.id

JAKARTA – Meski rencana pembangunan gedung baru dan alun-alun demokrasi menuai kritik, Dewan Perwakilan Rakyat tetap akan melanjutkan pembahasan anggarannya yang masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2018. Dewan akan mulai mengkaji proyek gedung baru ini pada pekan depan.

Anggota Badan Anggaran DPR, Jazilul Fawaid, mengatakan pembahasan itu merupakan kelanjutan rapat paripurna dengan agenda pandangan umum seluruh fraksi mengenai RAPBN dan nota keuangan yang berlangsung kemarin. “Pembahasan di Badan Anggaran bersama Kementerian Keuangan, BI, dan Bappenas untuk sinkronisasi, setelah itu dibawa ke komisi terkait,” kata dia di Gedung Dewan

di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, komisi hukum akan membahas dana gedung dan alun-alun demokrasi Rp 601 miliar karena masuk dalam anggaran Sekretariat Jenderal DPR sebesar Rp 1,7 triliun dari dana total RAPBN 2018 sebesar Rp 5,7 triliun. Sisanya, Rp 4 triliun, merupakan dana untuk satuan kerja DPR. Sekretariat Jenderal DPR merupakan mitra kerja Komisi Hukum.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini yakin anggaran untuk pembangunan gedung Rp 601 miliar itu akan dikabulkan pemerintah. Jika tidak, menurut anggota Komisi Hukum ini, berarti perencanaan pemerintah tidak dilakukan secara matang dalam membuat keseluruhan RAPBN 2018 sebesar Rp 2,204 triliun. “Semuanya sudah melalui kajian, dan akan dibangun dengan anggaran jamak,”

kata Jazilul.

Pembangunan gedung baru dan alun-alun demokrasi masuk dalam tujuh megaprojek DPR yang dicanangkan pada 2015. Selain dua bangunan itu, DPR rencananya akan membuat museum dan perpustakaan, jalan akses tamu ke gedung DPR, ruang pusat kajian legislasi, integrasi kawasan tempat tinggal anggota Dewan, dan *visitor center*.

DPR pun awalnya mengajukan anggaran ke pemerintah Rp 7,2 triliun untuk mengakomodasi pembangunan sebesar Rp 601 miliar. Namun pemerintah mencoretnya pada Mei lalu karena pagu yang tersedia Rp 4,3 triliun. Tiba-tiba, pada Agustus lalu, pemerintah kembali mengalokasikan anggaran gedung baru di pagu anggaran Rp 5,7 triliun.

Kemarin, dalam rapat paripurna yang membahas RAPBN 2018, tak satu fraksi pun yang menyinggung anggaran gedung baru. Mereka hanya menyoroti ihwal pertumbuhan ekonomi, dan

rasionalitas anggaran yang diajukan Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus lalu. Hanya Fraksi Gerindra yang menilai anggaran itu tidak realistis karena hanya mengutamakan pembangunan, bukan kesejahteraan rakyat.

Politikus PDI Perjuangan Eddy Kusuma Wijaya mengatakan fraksinya mendukung pembangunan gedung DPR. “Ini prioritas, karena DPR juga lambang negara,” ujar dia. Anggota komisi hukum ini menegaskan bahwa DPR akan membahasnya dalam waktu dekat.

Senada dengan Eddy, Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani menuturkan partainya menyetujui pembangunan gedung baru karena merupakan keperluan untuk meningkatkan sarana dan prasarana DPR. Namun, Muzani mengingatkan, sebaiknya pembangunan ditahan karena kondisi keuangan yang sedang morat-marit.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, karena Dewan perlu ruang dan fasilitas, mereka

seharusnya mendapatkan gedung baru. "Tapi itu terserah pemerintah," ujar dia.

Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang kemarin diundang Dewan, mengatakan sebaiknya DPR mendengar aspirasi masyarakat yang menilai pembangunan gedung baru ini negatif. Menurut dia, hal itu sudah diberitahukannya dalam rapat dengan DPR dan pimpinan DPR ketika menyusun anggaran untuk Dewan, termasuk gedung baru. "Jangan sampai nanti sudah dianggarkan, mendapatkan reaksi negatif, batal pembangunan. Jadi inefisiensi dalam pembelanjaan kita," ujar dia. ●



Suara Politikus Senayan

Rencana pembangunan gedung akan berlangsung mulus dalam proses pembahasan anggarannya di Dewan Perwakilan Rakyat. Musababnya, mayoritas fraksi mendukung pembangunan kantor baru untuk anggota Dewan. Berikut ini pendapat mereka atas rencana gedung baru tersebut.

EDDY KUSUMA WIJAYA, ANGGOTA KOMISI HUKUM DARI PDI PERJUANGAN:

"Pembangunan gedung baru ini prioritas. DPR merupakan lambang negara. Tempat kerja saat ini ruangnya kecil."

ANTON SIHOMBING, KETUA BADAN URUSAN RUMAH TANGGA DARI PARTAI GOLKAR:

"Gedung saat ini sudah tidak nyaman, saya enggak berani ngantor, takut rubuh. Kenapa enggak setuju pembangunan?"

AHMAD MUZANI, KETUA FRAKSI PARTAI GERINDRA:

"Sarana dan prasarana itu diperlukan. Tapi dalam kondisi keuangan yang masih berat, sebaiknya menahan diri."

JAZILUL FAWAID, POLITIKUS PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

"DPR kurang ruang kerjanya, apalagi nanti tambah 15 anggota pada Pemilu 2019. Pembangunan gedung ini perlu."

TAUFIK KURNIAWAN, WAKIL KETUA DPR DARI FRAKSI PAN:

"Kami perlu ruang dan fasilitas. Gedung itu milik rakyat, sangat logis kalau ada perbaikan ataupun pembangunan. Kalau jadi dibangun atau tidak itu alhamdulillah."

HASRUL AZWAR, WAKIL KETUA BURT DARI PPP:

"Semuanya sudah dibahas. Ini kebutuhan akan fasilitas, saat ini kondisi sudah melebihi kapasitas."

SURYA PALOH, KETUA UMUM PARTAI NASDEM:

"Kalau NasDem, menunda dulu. Salah untuk menolak."

DADANG HANURA, SEKRETARIS FRAKSI HANURA:

"Pembangunan bisa dilakukan setelah anggota Dewan memperbaiki kinerjanya. Dalam sektor legislasi maupun kehadiran dalam rapat."

MARDANI ALI SERA, WAKIL SEKRETARIS JENDERAL PKS:

"Belum perlu ada pembangunan gedung. Masih bisa ditata, ruang pimpinan DPR yang besar bisa dikasih untuk anggota."

● HUSSEIN ABRI DONGORAN